



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN 2018-2023
Kecamatan Antapani
Kota Bandung**



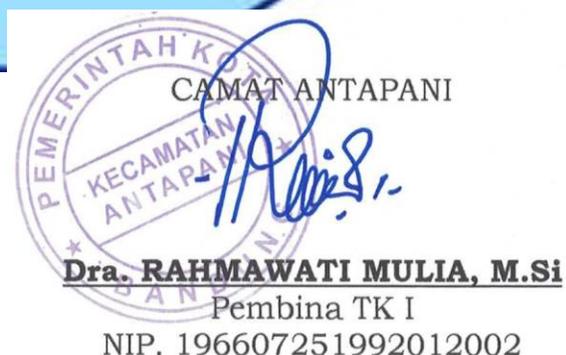
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 7 Desember 2021



CAMAT ANTAPANI
Dra. RAHMAWATI MULIA, M.Si
Pembina TK I
NIP. 196607251992012002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma dari *stering* kepada *empowerment* seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianya aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam konteks kompetisi itulah kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Antapani harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Pemerintah kota Bandung adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

Penyampaian Renstra ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GAMBAR.....vii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 6

 1.3 Maksud dan Tujuan 9

 1.4 Sistematika Penulisan10

BAB II12

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....12

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah12

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....17

 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....28

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 42

BAB III45

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....45

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 Perangkat Daerah45

 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Terpilih.....60

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra65

 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri.....65

 3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-202466

3.3.3 Penelaahan Terhadap Rencana Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat	669
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	723
3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031	723
3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023	789
3.5 Penentuan Isu Strategis	81
BAB IV.....	87
TUJUAN DAN SASARAN	87
4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Antapani	87
BAB V.....	96
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
5.1 Strategi Organisasi.....	96
5.2 Logic Model.....	98
BAB VI.....	106
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	106
BAB VII	97
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	97
BAB VIII	97
PENUTUP.....	97

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Antapani Berdasarkan Gol/ Ruang dan Pendidikan Tahun 2019	18
2.2	Sarana Ekonomi	23
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018	30
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani kota Bandung Tahun 2013-2018	38
3.1	Sinergitas isu strategis nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung	59
3.2	Keselarasan Misi pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	64
3.3	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis	84
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 Sebelum Perubahan	89
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 Setelah Perubahan	90
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023	94
4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023	95
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum Perubahan.....	104
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan setelah Perubahan.....	105
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Antapani	109
6.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2023 Setelah Perubahan	120
6.3	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019- 2023.....	132
7.1	Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Antapani Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	167

DAFTAR GAMBAR

1.1	Ilustrasi Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD	5
1.2	Ilustrasi Hubungan Pembangunan Daerah	6
2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	17
2.2	Profil Demografi Kepegawian Kecamatan Antapani	19
2.3	Profil Kependudukan Kecamatan Antapani	22
2.4	Profil Sarana Pendidikan Kecamatan Antapani	24
2.5	Profil Sarana Kesehatan dan KB Kecamatan Antapani	25
2.6	Profil Sarana Prasarana Ibadah Perumahan dan Hiburan Kecamatan Antapani	26
2.7	Profil Sarana Prasarana Transportasi Kecamatan Antapani	27
2.8	Profil Sarana Olahraga Antapani	28
2.9	Realisasi Anggaran 2018 Kecamatan Antapani	41
3.1	Visi Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	67
3.2	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung	76
3.3	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	78
5.1	Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 – 2023 Kecamatan Antapani....	98



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintahan yang kompetitif diantaranya diwujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan maksud agar masing-masing kabupaten /

kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengemas potensi daerahnya di dalam memasuki era kompetisi pasar bebas. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Termasuk aparatur kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) di masing-masing daerah.

Semangat untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan proses pelaksanaannya menjadi semakin baik, dapat dilihat dari direvisinya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi kedua menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai kecamatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan peran Kecamatan yang semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kecamatan Antapani merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Antapani oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), berdasarkan

hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat Undang – Undang tersebut dan dengan telah terbitnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Antapani 2018 – 2023 dengan memperhatikan beberapa faktor dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Memperhatikan substansi regulasi / kebijakan yang menjadi landasan operasional serta penyelarasan lebih lanjut dengan substansi berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, parsipatif, politik, top down dan bottom up seperti yang telah termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019 – 2023.
2. Cakupan program dan sistematika yang perlu disempurnakan.
3. Perlu penyelarasan terhadap indikator sasaran, indikator kinerja dan target indikator kinerja yang sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Antapani Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung tahun 2018 - 2023. Dalam menyusun RENSTRA ini juga selain berpedoman pada RTRW Kota Bandung, juga perlu memperhatikan RT RW kecamatan sekitar, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Kecamatan serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

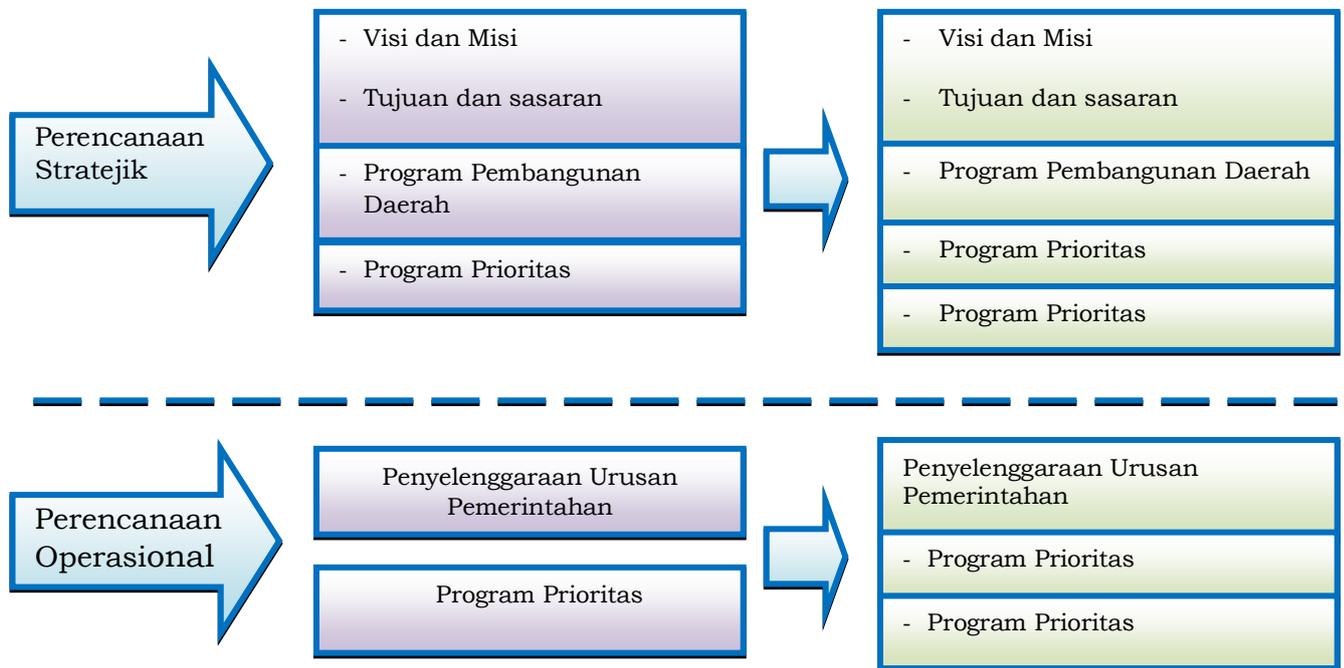
- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Antapani selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD. Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Antapani dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1

Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

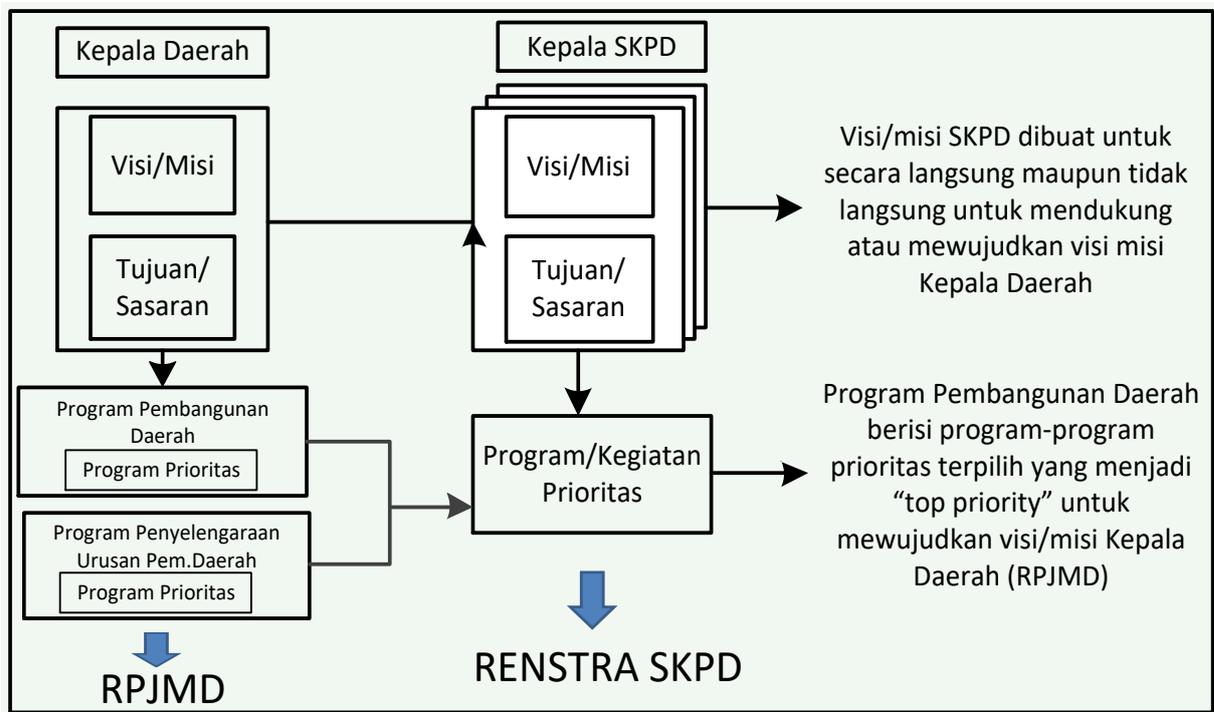


Renstra SKPD Kecamatan Antapani Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar

daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
 31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
 32. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Antapani, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Antapani Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Antapani Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

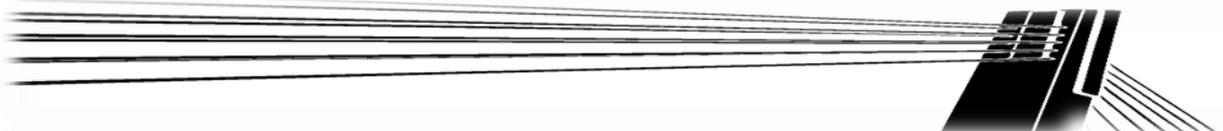
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Antapani mempunyai **fungsi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas dan fungsi camat pada Kecamatan Antapani Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan sebagai berikut :



Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;

13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;

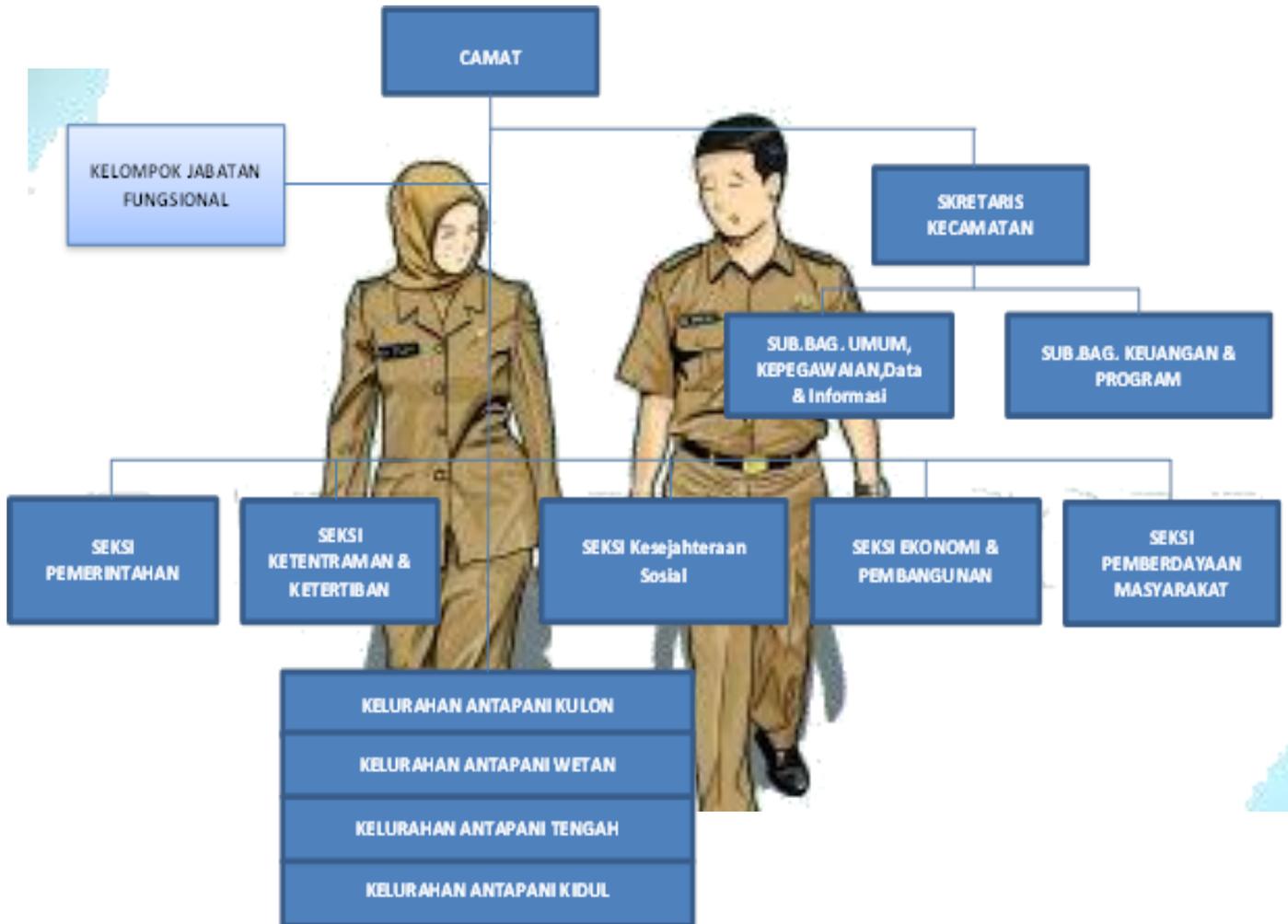
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Maka struktur organisasi Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Antapani sebagai perangkat daerah yang unggul. Komposisi jumlah pegawai Kecamatan Antapani dengan latar belakang pendidikan sarjana atau Diploma lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam kemajuan dan inovasi organisasi.

Tabel 2.1

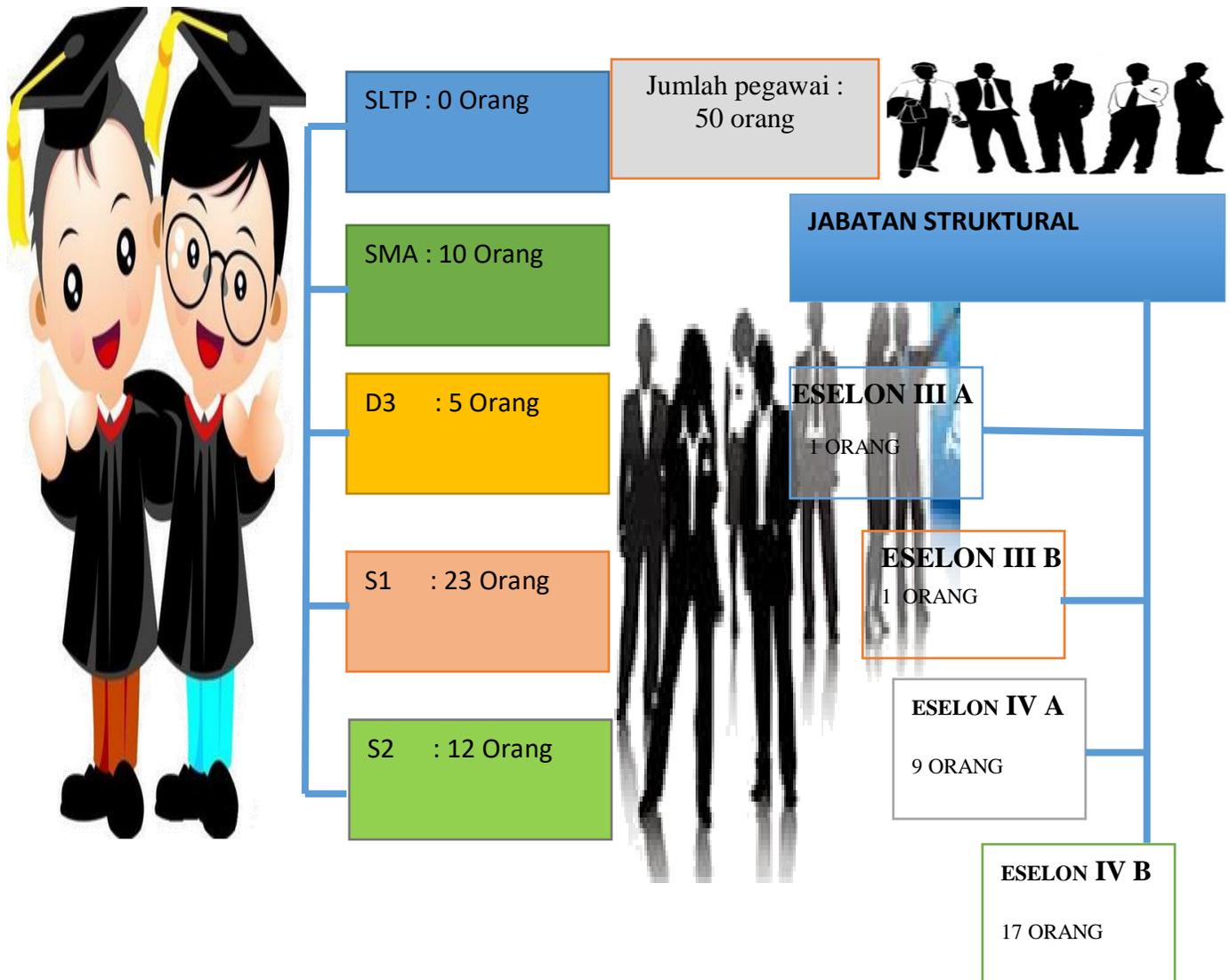
Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Antapani
berdasarkan Gol/Ruang dan pendidikan Tahun 2021

Gol / Ruang	Jumlah	Pendidikan								Jumlah
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SLTP	SD	
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	1	1							-	
IV/a	6	5	1							6
III/d	9	3	6							9
III/c	10	2	3		3		2			10
III/b	7	1	3		1		2			7
III/a	11		10		1					11
II/d	4						4			4
II/c	1						1			1
II/b	1						1			1
II/a	2									
I/d	-									
I/c	-									
I/b	-									
JUMLAH	50	12	23	0	5	0	10	0	0	50

Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Antapani Kota Bandung sebanyak 50 orang, terdiri dari Pejabat Struktural dan pelaksana di kecamatan dan kelurahan kelurahan se Kecamatan Antapani.

Gambar 2.2

Profil Demografi Kepegawaian Kecamatan Antapani



Demografi dan Geografi Kecamatan Antapani

Secara geografis Kecamatan Antapani terletak disebelah Timur Kota Bandung dengan luas wilayah 400,543 ha. dengan kepadatan penduduk rata-rata 147 jiwa per ha. Wilayah Kecamatan terbagi dalam 4 kelurahan, 63 rukun warga dan 341 rukun tetangga.



Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Antapani Wetan
- 2) Kelurahan Antapani Kulon
- 3) Kelurahan Antapani Tengah
- 4) Kelurahan Antapani Kidul

Kecamatan Antapani

merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Jend. A.H. Nasution (Kec.Mandalajati);
- Sebelah Timur : Kali Cikeley (Kec.Arcamanik);
- Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Kec.Buahbatu);
- Sebelah Barat : Kali Cidurian (Kec.Kiaracondong)



Keadaan Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga : 17.124 umpi

Jumlah Penduduk :

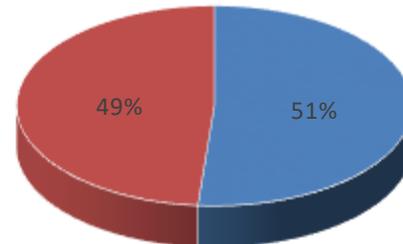
Laki-laki : 37.386 jiwa (51,03%)

Perempuan : 35.876 jiwa (48,97%)

Jumlah : 73.261 jiwa

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

■ LAKI LAKI ■ PEREMPUAN ■ ■

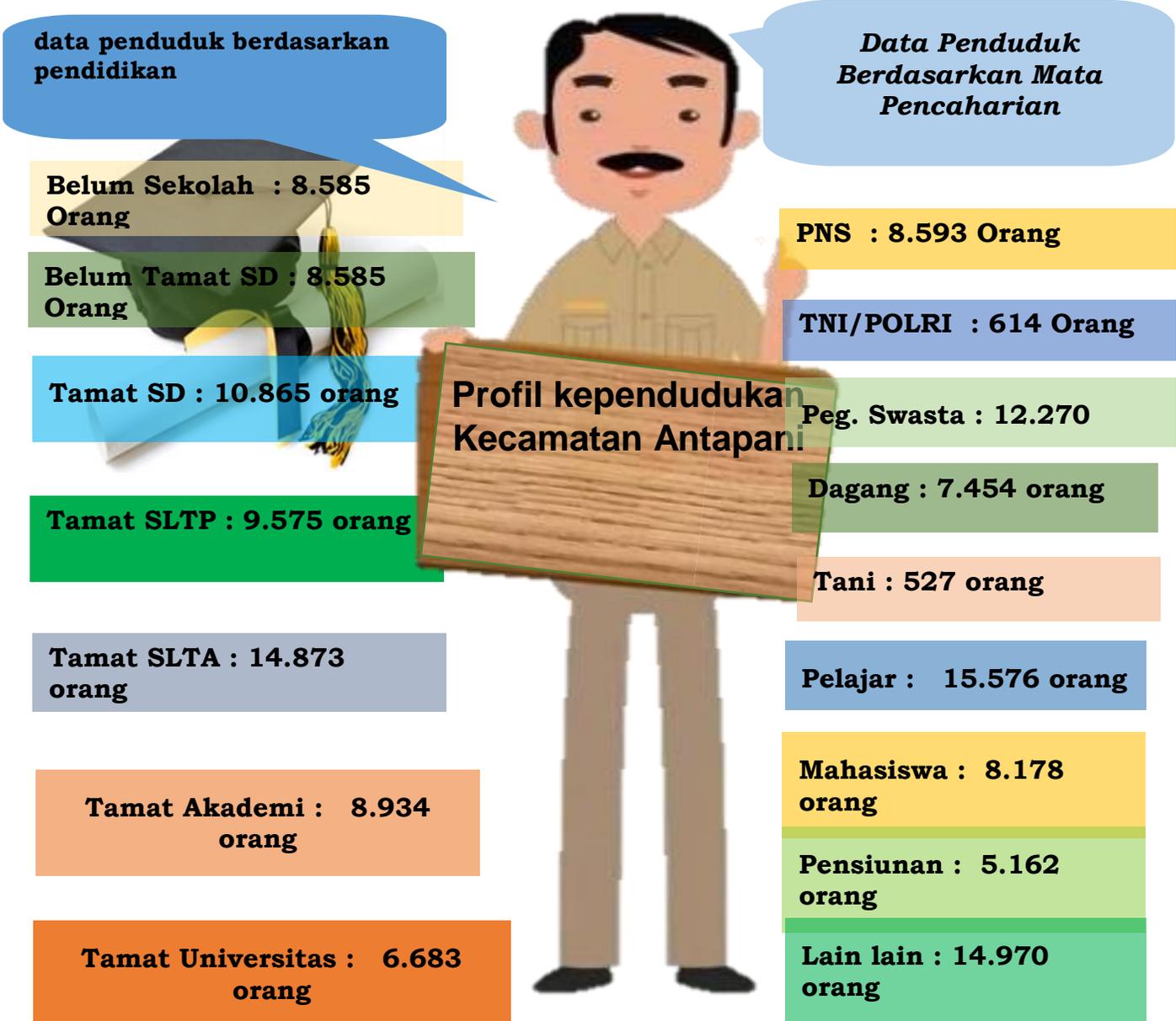


Data mengenai penduduk dikecamatan Antapani dapat dilihat dari grafis berikut

Gambar 2.3

Profil Kependudukan Kecamatan Antapani

**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN ANTAPANI :
JIWA**



Sumber : Profil Kecamatan Antapani 2019

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Antapani dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana Ekonomi

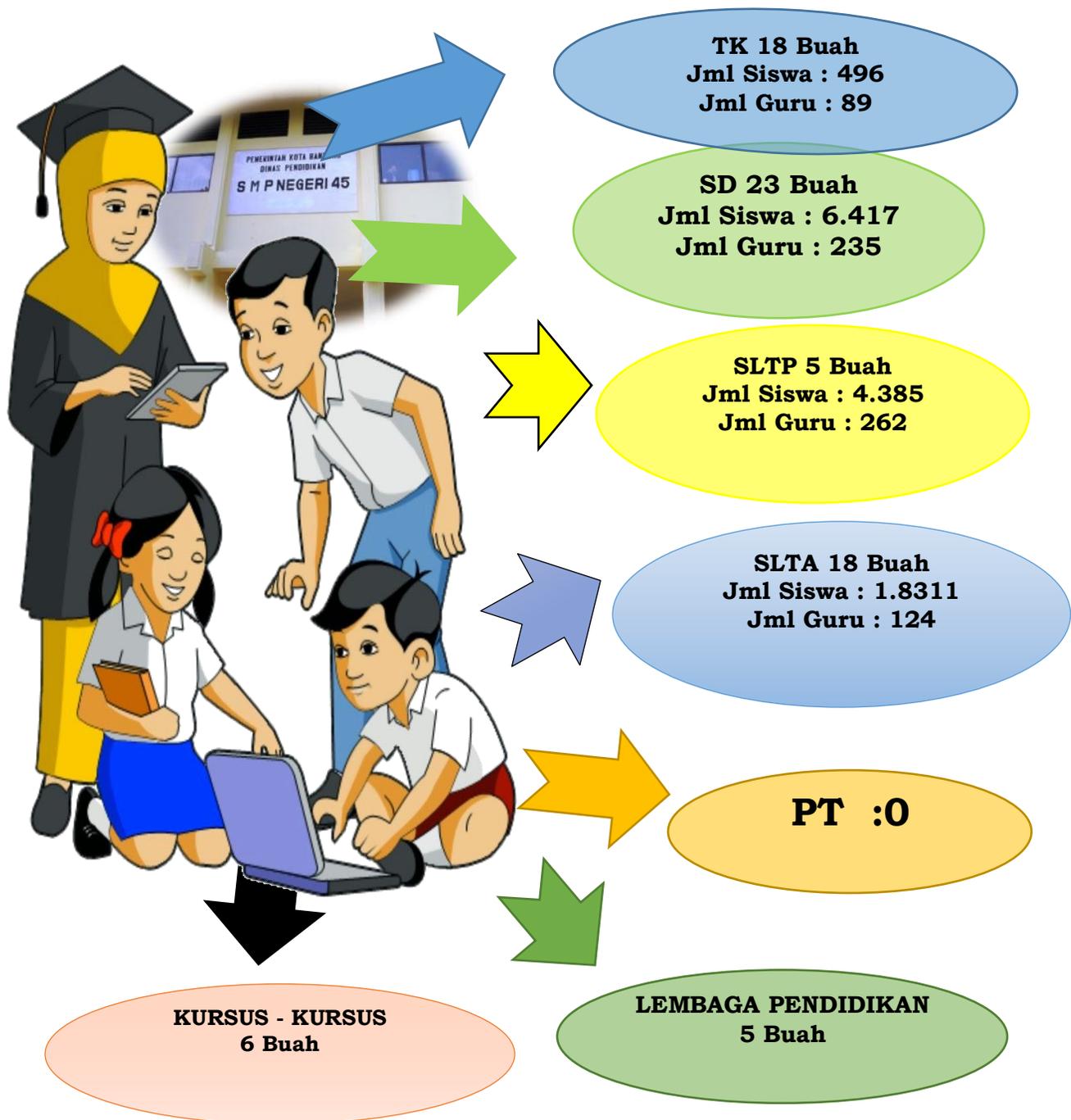
SARANA EKONOMI	JUMLAH
<i>Koperasi Simpan Pinjam</i>	<i>52 Buah</i>
<i>Toko / Kios / Warung</i>	<i>183 Buah</i>
<i>Wartel dan Rental</i>	<i>23 Buah</i>
<i>Perusahaan Besar /Sedang</i>	<i>31 Buah</i>
<i>Perusahaan Kecil / UKM</i>	<i>101 Buah</i>
<i>Perusahaan Rumah Tangga</i>	<i>6 Buah</i>
<i>Rumah Makan</i>	<i>2 Buah</i>
<i>Bank</i>	<i>15 Buah</i>
<i>Koperasi Produksi</i>	<i>1 Buah</i>
<i>Koperasi Konsumsi</i>	<i>1 Buah</i>
<i>Pasar Umum</i>	<i>1 Buah</i>
<i>SPBU</i>	<i>2 Buah</i>
<i>Pegadaian</i>	<i>2 Buah</i>

Sumber : 2019



Gambar 2.4

Profil sarana pendidikan Kecamatan Antapani



Gambar 2.5

Profil sarana Kesehatan dan KB Kecamatan Antapani



Prasarana	Jumlah
Rumah Sakit	1
Rmah Bersalin	2
Dokter Umum	28
Dokter Anak	2
Dokter Kandungan	4
Dokter Gigi	20
Dokter Spesialis Lainnya	4
Dokter Hewan	-
Puskesmas	3
Klinik / Balai Pengobatan	-
Apotik	11
Toko Obat	-
Posyandu	67

Uraian	Jumlah
Jumlah Pos / KB	62
Jumlah PUS	10.064
Jumlah PUS masuk KB	7.199
Jumlah Akseptor KB	7.199
IUD	925
MOW	2.840
MOP	210
KONDOM	2.947
IMPLAN	31
SUNTIK	169
PIL	3.353
KB MANDIRI	77
KLINIK KB PEMERINTAH/PUSKESMAS	3



Gambar 2.6

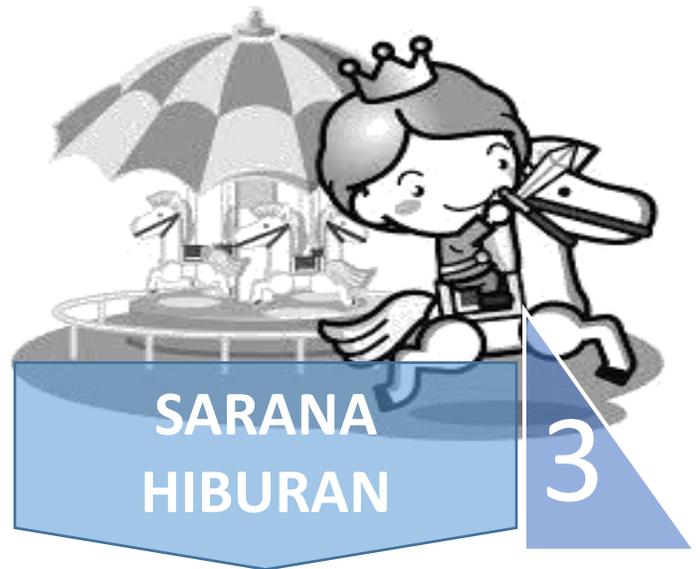
Profil sarana *Prasarana Ibadah Perumahan dan Hiburan* Kecamatan Antapani



PRASARANA	JUMLAH
Mesjid	72
Surai/Mushola	12
Gereja	1
Vihara	-



PRASARANA	JUMLAH
Permanen	27.466
Semi Permanen	2.439
Tidak Permanen	114



PRASARANA	JUMLAH
Taman	6
Tempat Pertunjukan Tradisional	-
Toko Cenderamata/Souvenir	2
Hotel	-
Penginapan/Losmen	1
Sanggar Seni	1
Bioskop	-



Gambar 2.7

Profil sarana *Prasarana Transportasi* Kecamatan Antapani

SARANA TRANSPORTASI

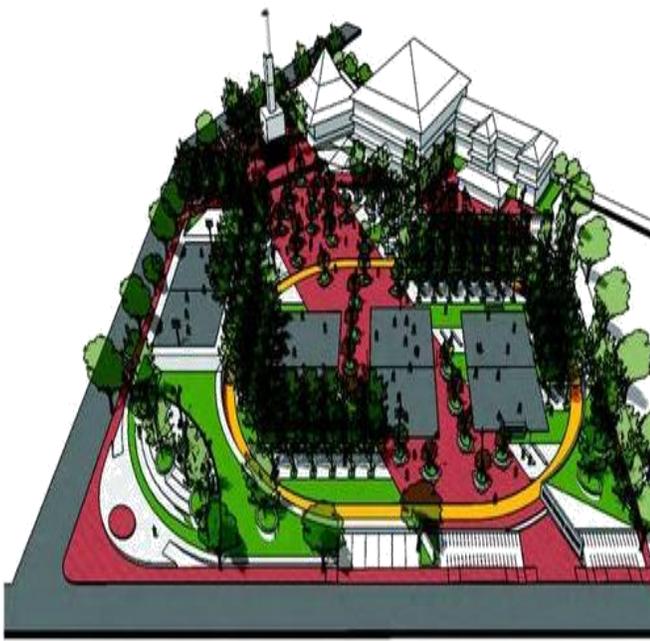
Lalu lintas yang digunakan di Wilayah Kecamatan Antapani sepenuhnya (100%) melalui darat. Dengan daya dukung sarana terdiri dari :



Gambar 2.8

Profil sarana **Olahraga** Kecamatan Antapani

SARANA OLAHRAGA



PRASARANA	JUMLAH
Sepak Bola	2
Bulu Tangkis	13
Tenis Meja	57
Voli	27
Basket	4
Tenis Lapangan	4
Futsal	4

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui



trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

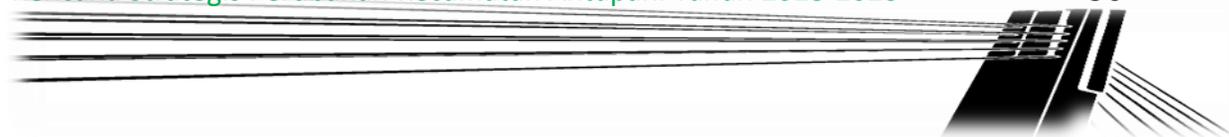
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Antapani berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dapat disajikan pada table T-C.23 sebagai berikut:



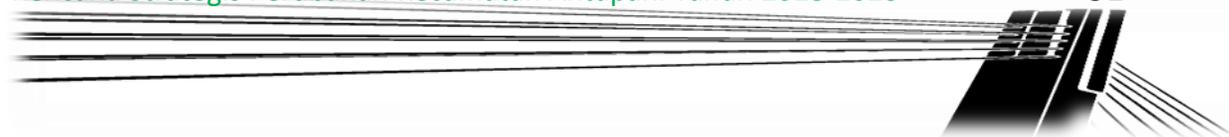
Tabel.T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				75	82	82,28	n/a	n/a	80,02	82,02	82,29	n/a	n/a	106,69	98,94%	100,01%	n/a	n/a
	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				-	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100,00%	100,00%	n/a	n/a
	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				-	905	908	n/a	n/a	900	906	955	n/a	n/a	109,76	99,02%	105,18%	n/a	n/a
	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				-	91,80	93,96	n/a	n/a	91,78	93,91	n/a	n/a	n/a	107,98	101,98%	N/A	n/a	n/a



Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				n/a	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100,00%	100,00%	n/a	n/a
Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				n/a	75	75	n/a	n/a	50	75	75	n/a	n/a	100	75,00%	100%	n/a	n/a
Prosentase RW Juara				n/a	51,61	77,10	n/a	n/a	40,33	77,96	77,27	n/a	n/a	100	115,04%	100,22%	n/a	n/a
Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				n/a	70	75	n/a	n/a	62,5	71,43	78,57	n/a	n/a	111,11	81,63%	104,76%	n/a	n/a
Rasio Anggota Linmas				n/a	1:01	1:1,10	n/a	n/a	0,94:1	1:1,09	1:1,10	n/a	n/a	188	100,00%	100,92%	n/a	n/a
Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				n/a	n/a	n/a	80	80,5	n/a	n/a	n/a	82,83	-	n/a	n/a	n/a	103,54%	-
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				n/a	n/a	n/a	75	77,50	n/a	n/a	n/a	85,08	-	n/a	n/a	n/a	113,44%	-
Nilai Evaluasi AKIP				52	60	63,10	n/a	n/a	53,33	62,88	63,53	n/a	n/a	102,56	88,56%	100,68%	n/a	n/a
Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100,00%	100%	n/a	n/a



Interpretasi dari tabel T-C.23 adalah sebagai berikut :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik yaitu mendekati 100%. Dari 5 (lima) tahun pelaksanaan Restra , pada tahun 2013 terjadi penurunan dalam penyerapan anggaran yang cukup signifikan. Hal tersebut karena output yang dihasilkan telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan 5 tahun pelaksanaan Capaian program dan kegiatan di Kecamatan Antapani sebesar 92 % Adapun penyerapan pada tahun anggaran 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Analisis efisiensi **“Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”**.

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, sebesar **Rp. 68,650,000**.
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasulasinya kegiatan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat melalui : Pendataan dan pembinaan Koperasi, peningkatan pemahaman dan promosi usaha melalui pembinaan UKM.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar **Rp. 54,635,700**.
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
 - a) Terlaksananya Pembinaan UKM, Koperasi masing-masing sebanyak 1 kali kegiatan.
 - b) Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Koperasi, masing-masing sebanyak 1 kali kegiatan.

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar **100 %** sedangkan output sebesar **80 %**.

2. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, sebesar **Rp. 300.900.000.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui : pendataan penyandang cacat, serta pembinaan GSI, RBM dan Posyandu.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar **Rp. 282,881,725**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
 - a) Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, sebanyak 1 kali kegiatan.
 - b) Terlaksananya pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu), sebanyak 1 kali pembinaan.
 - c) Terlaksananya pembinaan RBM, sebanyak 1 kali pembinaan.
 - d) Terlaksananya pembinaan Posyandu, sebanyak 9 kali pembinaan per kelurahan.

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar **100 %** sedangkan output sebesar **94%**.

3. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, sebesar **Rp. 1,390,389,750.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan Infrastruktur dan lingkungan hidup

masyarakat, melalui musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan, Pemeliharaan fasilitas umum dan sosial lingkungan RW di kelurahan, serta pengadaan alat biofori, tempat sampah dan SUMur Resapan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar **Rp. 1,282,846,069**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
 - a) Terlaksananya Musrenbang, sebanyak 5 kali pelaksanaan.
 - b) Terlaksananya Penyusunan data pembangunan kecamatan, sebanyak 1 kali pelaksanaan.
 - c) Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kelurahan, sebanyak 4 kali pelaksanaan.
 - d) Pemasangan Dolkenisasi terhadap Pohon/tanaman yang berada di sekitar Kecamatan Antapani.
 - e) Terlaksananya penyuluhan lingkungan yang bersih dan sehat sebanyak 1 kali pelaksanaan.
 - f) Pemeliharaan Kirmir dan Kerb di jalan Lingkungan
 - g) Pembuatan sumur resapan
 - h) Pengadaan alat biofori

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar **100 %** sedangkan output sebesar **92%**.

4. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, sebesar **Rp. 26.400.000,00.**

- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban, berupa : pembinaan Linmas, Satwankar serta Ormas dan OKP.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar **Rp 15.424.050**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
 - a) Terlaksananya Pembinaan Ormas dan OKP sebanyak 1 kali pembinaan.
 - b) Terlaksananya Pembinaan Linmas, sebanyak 1 kali pembinaan.
 - c) Terlaksananya Pembinaan Satwankar, sebanyak 1 kali pembinaan.
 - d) Pendataan PKL dan Pembinaan PKL

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar **100 %** sedangkan output sebesar **58 %**.

5. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, sebesar **Rp. 650,305,000.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan Pemerintahan umum berupa : Pembuatan fropil Monografi dan data Monografi, pembinaan RT/RW, pembinaan kelurahan siaga serta sosialisasi pemekaran Rt/Rw.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar **Rp 607,157,140**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :

- a) Tersedianya data monografi Kecamatan dan Kelurahan
- b) Terlaksananya pembinaan RT dan RW, sebanyak 12 kali pembinaan.
- c) Terlaksananya Pemilihan kelurahan terbaik, sebanyak 1 kali pelaksanaan.
- d) Terlaksananya sosialisasi perda pemekaran Rt/Rw, sebanyak 1 kali pelaksanaan.

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar **100 %** sedangkan output sebesar **93 %**.

6. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, sebesar **Rp. 144,800,000.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berupa : sosialisasi Perda Kependudukan, pendataan penduduk musiman, pemutakhiran data penduduk serta pendampingan operasi Yustisi Kependudukan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar **Rp 129,390,730.**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
 - a) Terlaksananya sosialisasi perda kependudukan, sebanyak 1 kali pelaksanaan.
 - b) Terlaksananya pendataan penduduk musiman, sebanyak 1 kali pelaksanaan.
 - c) Terlaksananya pemutakhiran data penduduk, sebanyak 1 kali pelaksanaan.

d) Penyisiran warga yang belum melaksanakan perekaman e-ktip 1 bulan

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar **100 %** sedangkan output sebesar **89 %**.

Tabel T-C.24
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung
 Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
BELANJA	4.693.141. 401	4.319.1970.6 44	4.939.966. 079	5.472.433. 335,58	10.813.205.7 33,23	4.464.341. 693	4.278.544. 468	4.626.084. 939	5.387.254. 949		95,12 %	99,06 %	93,65 %	98,44 %		1.224.012.866,40	849.712.592,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.852.493. 834	2.903.186.1 00	3.331.191. 079	3.615.901. 569,40	4.219.357.3 09,23	2.662.478. 849	2.890.683. 535	3.227.803. 043	3.564.960. 118		93,34 %	99,57 %	96,89 %	98,60 %		273.372.695	248.813.917,40
BELANJA LANGSUNG	1.840.647. 567	1.415.951.5 44	1.608.775. 000	1.856.531. 766,18	6.593.848.4 24	1.801.862. 844	1.387.860. 933	1.398.281. 896	1.822.294. 831		97,90 %	98,01 %	86,91 %	98,15 %		950.640.171,40	600.898.674,80



**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung
Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	34.388.500	5.878.000	21.357.500	56.490.000	33.910.000	34.384.500	5.874.900	21.335.000	56.457.477	28.502.000	99,99 %	99,95 %	99,89%	99,94%	84,05 %	6852300.00	4050240.00
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	110.767.000	58.150.000	67.860.000	130.405.000	-	110.755.940	58.053.750	67.859.900	130.365.744	-	99,99 %	99,83 %	99,99%	100,00 %		197047600.00	181734731.00
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan	208.691.000	15.968.000	34.365.000	79.020.000	1.701.069.867	207.128.500	15.964.000	34.364.800	77.028.300	1.572.533.425	99,25 %	99,97 %	100,00 %	97,48%	92,44 %	236339750.00	215143513.80
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24.319.000	10.300.000	16.385.000	20.000.000	427.236.763	24.318.500	10.299.950	16.384.950	19.999.700	366.550.000	100,00 %	99,99 %	99,99%	99,99%	85,80 %	416200.00	1778890.00
Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	63.166.000	13.000.000	29.185.000	67.440.000	1.900.961.975	62.666.000	12.944.900	29.182.500	67.143.815	1.850.446.900	99,21 %	99,58 %	99,99%	99,60%	97,34 %	117427800.00	108898228.00

Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	42.728.817	37.925.000	36.660.000	197.143.000	10.800.000	42.721.300	37.862.200	36.660.000	196.507.098	10.592.000	99,98 %	99,83 %	99,99%	99,70%	98,07 %	20414236.60	17333886.00
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	391.471.668	0	0	0	0	336.050.450	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	85,84 %		
Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	0	0	0	839.495.000	0	0	0	0	729.208.750	0	0	0	0	86,86 %		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW		7.252.900.000	7.314.000.000	6.212.322.131	4.733.560.693		6.923.380.299	7.201.012.672	6.137.757.934	4.591.738.578		95,46 %	98,46%	98,80%	97,00 %		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK		400.000.000	400.000.000	398.314.874	284938400		375.264.925	398.694.675	388.170.000	255.340.202		93,82 %	99,67%	97,45%	89,61 %		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna		400.000.000	400.000.000	397.728.103	381912500		367.995.250	397.362.300	383.992.595	328.537.622		92,00 %	99,34%	96,55%	86,02 %		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM		400.000.000	400.000.000	402.696.937	345184500		377.917.432	392.079.190	396.752.779	320.322.562		94,48 %	98,02%	98,52%	92,80 %		



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada hampir pada semua program dan kegiatan pada kecamatan Antapani tahun 2013-2018 rasio antara realisasi dan anggaran sudah cukup besar hampir mencapai 100%. Dengan capaian rata rata diatas 92 %. Selisih tersebut merupakan hasil efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung sebagai berikut:

Gambar 2.9

Realisasi Anggaran 2018 Kecamatan Antapani



URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%
Belanja Pegawai	8.679.117.361,00	8.483.076.780,00	97,74
Belanja Barang	14.829.468.789,00	14.202.832.746,00	95,77
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	23.508.586.150,00	22.685.909.526,00	96,50

Sumber : Sekretariat Kecamatan Antapani (angka audited 2018)

Realisasi keuangan Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 untuk belanja sebesar Rp. **23.508.586.150,00** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. **8.483.076.780,00** (97,74%) dan belanja langsung sebesar Rp. **14.202.832.746,00** (95,77%).



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Antapani sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Antapani untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Antapani harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- 8) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- 9) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- 10) Pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Antapani dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Antapani berada dalam Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Antapani;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Antapani belum tertata dengan baik.
8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Antapani masih perlu ditingkatkan lagi;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Antapani memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Antapani yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;

4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Antapani cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Antapani Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Antapani yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut



dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Antapani dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional dapat diuraikan berikut ini :

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Antapani dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Antapani sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Antapani pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2018, sebanyak 1 kelurahan yang memperoleh capaian IKM di dibawah 81,00. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Antapani. Selain belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Antapani perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Antapani perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Antapani sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Antapani saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak

optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Antapani merupakan salah satu SKPD di dalamnya;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Antapani dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Antapani, sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 3 kelurahan karena keterbatasan anggaran untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
9. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;
10. Masih banyak belum dilakukan rembuk warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Antapani, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Antapani sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Antapani, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu international, nasional, provinsi serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung sebagai berikut:

a. Pemulihan Ekonomi

Walaupun mengalami kecenderungan penurunan, namun pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2020 baik Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kota Bandung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,28 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kontraksi Kota Bandung tahun 2020 sedikit lebih dalam dari kondisi nasional yang sebesar -2,07 persen, namun berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar -2,44 persen. Indikator lain yang menunjukkan perekonomian Kota Bandung mengalami penurunan yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita sebagai salah satu variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan dari Rp17.254 ribu rupiah/ orang/tahun pada tahun 2019 menjadi Rp16.887 ribu rupiah/ orang/tahun pada 2020.

Salah satu pendekatan mengatasi masalah perekonomian yang telah dan tetap akan diterapkan di Kota Bandung adalah konsep *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak utamanya.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka pemulihan perekonomian, sejak tahun 2020, Pemerintah dan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan antara lain pemberian berbagai insentif untuk menggairahkan sektor swasta dan UMKM, bantuan sosial, keringanan pajak, dan sebagainya. Kebijakan untuk pemulihan ekonomi masih tetap perlu diprioritaskan sampai akhir periode pembangunan jangka menengah Kota Bandung untuk menghidupkan kembali kondisi kota yang dinamis dengan masyarakat yang sejahtera.



b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Bandung, dengan sasaran kesehatan secara *Continuum of Care* (dari lahir hingga lansia). Bukan hanya AKI AKB dan *stunting* masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi di satu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita obesitas meningkat (*the double burden of diseases*). Ketersediaan layanan kesehatan di Kota Bandung yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 80 puskesmas, yang di dalamnya terdapat 7 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kota Bandung.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama.

Sampai dengan saat ini sebagian besar penyelenggara pendidikan anak usia dini oleh masyarakat sementara, sedangkan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 TK Negeri. Sementara itu layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Bila standar rasio rombel tingkat SD = 1: 28, saat ini pada SDN di Kota Bandung adalah 1:31 dengan rombel 7.424 dan jumlah kelas hanya 2.952. Pada tingkat SMP rasio rombel di Kota Bandung adalah 1:33, sedangkan standar nasional 1:32 dengan jumlah rombel 3.361 dan ruang kelas 2.994. Selain itu kualitas

sarana dan prasarana pendidikan serta [redacted] pengajar pada sekolah negeri belum merata. Terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah yang berlokasi jauh dari rumah.

d. Penanggulangan Kemiskinan dan PPKS

Kota Bandung sebagai salah kota yang sibuk di Jawa Barat dengan berbagai aktivitas masyarakatnya, tidak terlepas dari masalah kemiskinan, pengangguran dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kemiskinan di Kota Bandung terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan.

Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 84.670 jiwa atau mencapai 3,38% dari jumlah warga Kota Bandung. Namun kondisi tersebut berbalik di tahun 2020, dimana jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 100.020 jiwa atau mencapai 3,99%. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19.

Peningkatan kemiskinan pada tahun 2020 diikuti juga dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 11,19 persen. Berdasarkan data BPS, TPT Kota Bandung ini lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat sebesar 10,46% dan nasional yang mencapai 7,07%. Peningkatan tingkat pengangguran baik di Kota Bandung, maupun provinsi dan nasional merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

e. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai aspek. Aspek lingkungan hidup di Kota Bandung yaitu:

1. Air. Ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, pelayanan air bersih yang belum mencukupi. Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdapat indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan. Nilai IKLH Kota Bandung saat ini berada pada tingkat “waspada” yang menunjukkan buruknya kualitas lingkungan Kota Bandung. Penyebab terbesar buruknya nilai IKLH berasal dari rendahnya indeks kualitas air, yang menunjukkan kadar BOD5 pada seluruh sampel air sungai berada jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi fisik air sungai terlihat keruh, menghitam, dan berbau busuk, sebagai akibat pencemaran air limbah domestik yang cukup dominan.

2. Peta kontur muka air tanah yang merupakan hasil Kajian Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Kota Bandung pada Tahun 2017. Pada peta kontur tersebut dapat dilihat terbentuknya kerucut-kerucut permukaan air tanah yang menunjukkan terjadinya eksploitasi air tanah dalam jumlah besar di beberapa tempat sehingga mengakibatkankekritisanairtanah di tempat-tempat tersebut. Menurunnya resapan air, berpengaruh pula pada cakupan pelayanan air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kota Bandung baru mencapai 72,15% dengan sumber air baku untuk pengolahan air bersih berasal dari air permukaan (sungai dan danau) di luar wilayah Kota Bandung.
3. Udara. Polusi udara yang semakin bertambah meskipun nilai Indeks Kualitas Udara Kota Bandung masih cukup baik, yaitu pada angka 69,79 poin, tetapi dari hasil pengukuran kualitas udara ambien pada roadside terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada parameter PM2,5 terutama di daerah sekitar terminal. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran dari sektor transportasi sudah demikian besar karena parameter PM2,5 ini biasanya dihasilkan dari residu sisa pembakaran bahan bakar kendaraan.
4. Sampah. Timbulan sampah di kota metropolitan seperti Bandung mencapai 1.500 – 1.600 ton setiap hari. Walaupun penghargaan Adipura sering didapat Kota Bandung beserta sederet penghargaan bergengsi lainnya, namun permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Sumber sampah utama, yaitu dari rumah tangga (70%). Komposisi sampah umumnya organik yang mudah membusuk (45%), anorganik (24%) dan residu (31%). Pengelolaan sampah saat ini dilakukan

dengan pola Kumpul – Angkut – Buang. Saat ini 78,74% sampah diangkut ke TPPAS Sarimukti. Pengurangan sampah pola 3R mencapai 14.32%. Sekitar 12,21% sampah belum tertangani, yang dibuang ke TPS – TPS Liar, selokan dan sungai. Sejak tahun 2005, Kota Bandung tidak memiliki TPA, sehingga pembuangan akhir sampah dilakukan ke TPPAS Sarimukti, di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan dibawah pengelolaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang akan ditutup dan dipindah ke TPPAS Legok Nangka tahun 2019. Dana kompensasi ke TPPAS Sarimukti saat ini sebesar Rp. 61.250,00/ton sampah, dengan jarak angkut 42 km. Direncanakan biaya pengolahan sampah di TPPAS Legok Nangka meningkat mencapai 6-7 kali lipat saat ini, karena menggunakan teknologi thermal yang berbiaya cukup mahal. Dengan demikian maka beban biaya pengelolaan sampah akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

4. Bencana. Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana di Kota Bandung mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah kejadian banjir bandang di Jatihandap. Bencana ini terjadi bukan hanya akibat faktor hujan deras, tetapi faktor lain yang juga sangat penting adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Permasalahan tersebut berkaitan dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memenuhi mandat undang-undang yaitu sebesar 30%. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan kawasan resapan air. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) atas eksploitasi lahan diantaranya menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Bandung. Berkurangnya luas kawasan berakibat pula pada ketersediaan air tanah yang semakin kritis.

f. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu

pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah.

Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan sarana prasarana penurunan genangan untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
2. Pengendalian kemacetan lalu lintas pada 8 titik yang semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiwaan, pemborosan dan lain sebagainya. Beberapa gagasan telah dibahas, seperti (1) Transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik (2) Pembangunan jalan layang (*flyover*) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) dan lain sebagainya.
3. Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).

g. Tata Kelola Pemerintahan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Bandung sebagai Kota

Cerdas (*smart city*). Dalam hal tata [redacted] bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.

h. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

Pelayanan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Kota Bandung membutuhkan biaya triliunan rupiah untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah saat ini yaitu dana dari pemerintah pusat (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dana tersebut belum mencukupi untuk memenuhi dapat memberikan tingkat layanan dasar maupun layanan prima menuju kota yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif.

Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholders. Sumber-sumber tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat.

Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan hingga Tahun 2019 mencapai Rp 297,9 miliar. Instrumen pembiayaan lain yang telah dimanfaatkan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana selama tahun 2015-2019, kontribusi CSR cukup signifikan yaitu mencapai Rp116.298.907.600,00. Selain itu, instrumen pembiayaan lainnya adalah Sumbangan Pihak Ketiga dimana pada tahun 2015-2019 mencapai Rp26.869.525.127,00. Indikasi ini menunjukkan adanya suatu potensi yang

perlu terus dikembangkan untuk bersinerjikan pembiayaan pembangunan di Kota Bandung.

Adapun ketentuannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 1010 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 067 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 secara umum memiliki keterkaitan dengan isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat, dan isu strategis TPB dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung, dengan tetap mempertimbangkan asas demokrasi bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Persandingan tersebut disajikan pada tabel berikut. Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS dan Kota Bandung disajikan pada matriks keterkaitan antara isu strategis Nasional, Provinsi, KLHS, dan Kota.



Tabel 3.1

Sinergitas isu strategis nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 5. Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran 2. Penataan ruang 3. Iklim usaha, pariwisata dan industri kreatif 4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan 5. Penanganan penyakit menular Covid – 19 6. Permasalahan banjir, sampah dan penurunan kualitas udara 7. Kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas 8. Peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi 9. Belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan Infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan ekonomi 2. Peningkatan derajat masyarakat 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Penanggulangan kemiskinan dan PPKS 5. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan 6. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang 7. Tata kelola pemerintahan (peningkatan kualitas pelayanan publik) 8. Sinergi pembiayaan pembangunan



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*

- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari



kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta



Tabel 3.2
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan
Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005-2025	MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Antapani tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Antapani adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Antapani.

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Gambar 3.3
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

3.3.3 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah

dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID- 19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat

meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

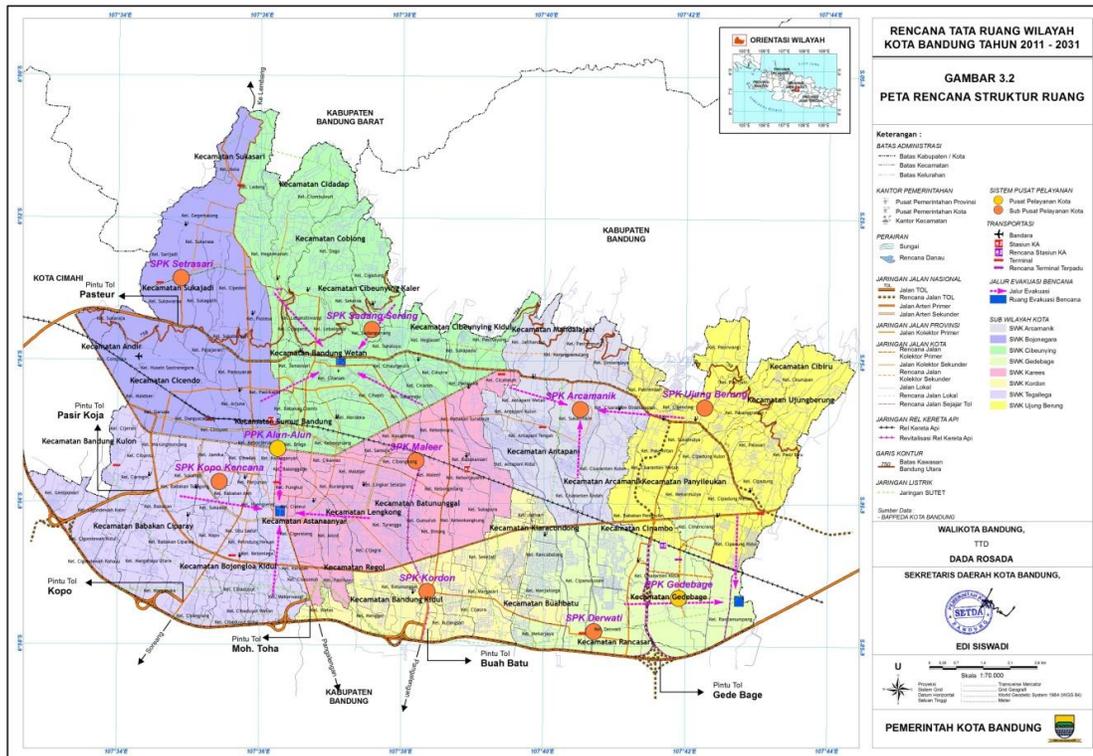
- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Antapani;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;

- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Antapani, Ujungberung, Cinambo, Antapani;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;

3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 20 (Dua Puluh) Tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

3.4.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Antapani Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Rentang kendali antara Kecamatan dan Kelurahan baik secara luas wilayah, batas-batas wilayah, lokasi kantor, jumlah RW, dan jumlah kelurahan relatif terlalu jauh.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan

kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH
 - a. Isu Infrastruktur

Kecamatan Antapani masuk ke dalam Rekomendasi Arahan Kebijakan dalam penyediaan **RTH Skala Lingkungan**. Arahan lokasi prioritas terhadap penciptaan ruang yang sehat berada di Kecamatan bojongloa kaler, Kec.Sukajadi, Kec.Cicendo, Kec.Andir, Kec.Coblong, Kec.Antapani, Kec.Kiaracondong dan Kec.Buahbatu.
6. Kemacetan lalu lintas
7. Ketersediaan transportasi umum
8. Buruknya drainase lingkungan
9. Kualitas jalan
 - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
 - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran

- d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
- e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
- f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
- g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Antapani dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut

Tabel 3.4
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p> <p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan</p>



		<p>prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Antapani dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak</p>
--	--	--



		<p>terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan</p>
--	--	--



		<p>pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
--	--	--





4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Antapani

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Antapani menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2019 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019 – 2023 sebelum Perubahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Antapani	Nilai	80	80	81	81	81
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80	81	81	81
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	Jumlah Kelurahan yang telah masuk dalam kriteria Kelurahan unggul dibagi jumlah kelurahan yang ada	%	50	50	50	75	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	Jumlah sub kegiatan yang direalisasi oleh RW/ LKK dibagi dengan jumlah sub kegiatan yang dianggarkan RW/ LKK	%	80	80	80,50	81	81,50
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	Jumlah sub kegiatan yang direalisasi oleh RW/ LKK dibagi dengan jumlah sub kegiatan yang direncanakan/ dianggarkan oleh RW/ LKK	%	80	50	80,50	81	81,50



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019 – 2023 setelah Perubahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)							
1										
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan dikali 100%	%	n/a	n/a	80,50	81	81,50
		Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Antapani	Persentase Siskamling RW aktif	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	%	n/a	n/a	76	78	80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Antapani	Persentase Kelurahan Unggul	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	%	50	50	75	75	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Nilai	80	80	86	86,50	87

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para



Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.

6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih

berorientasi hasil/ *outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Antapani juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
 - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan
 - b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Antapani
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Antapani
 - b. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Antapani
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan Renstra Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Antapani
Tahun 2018 – 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani									
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Nilai	80	80	81	81	81
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	50	75	100
Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi									
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	80	50	80,50	81	81,50

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Kecamatan Antapani
Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	n/a	88,49	75,04	80,50	81,00	81,50	81,50
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Antapani	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	n/a	88,49	75,04	80,50	81,00	81,50	81,50
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Antapani	Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	n/a	76	78	80	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Nilai	82,29	83,61	86,08	86,00	86,50	87,00	87,00
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Antapani	Persentase Kelurahan Unggul	%	n/a	50	75	75	75	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Nilai	82,29	83,61	86,08	86,00	86,50	87,00	87,00





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



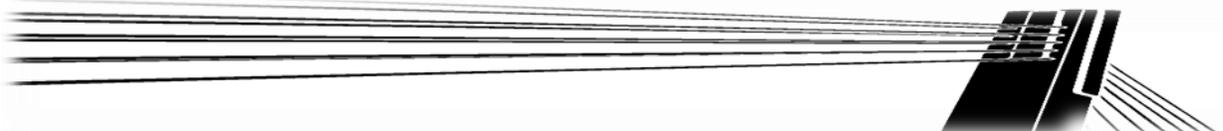
1.1 Strategi Organisasi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2019-2023 yaitu analisis Logic Model.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.



Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

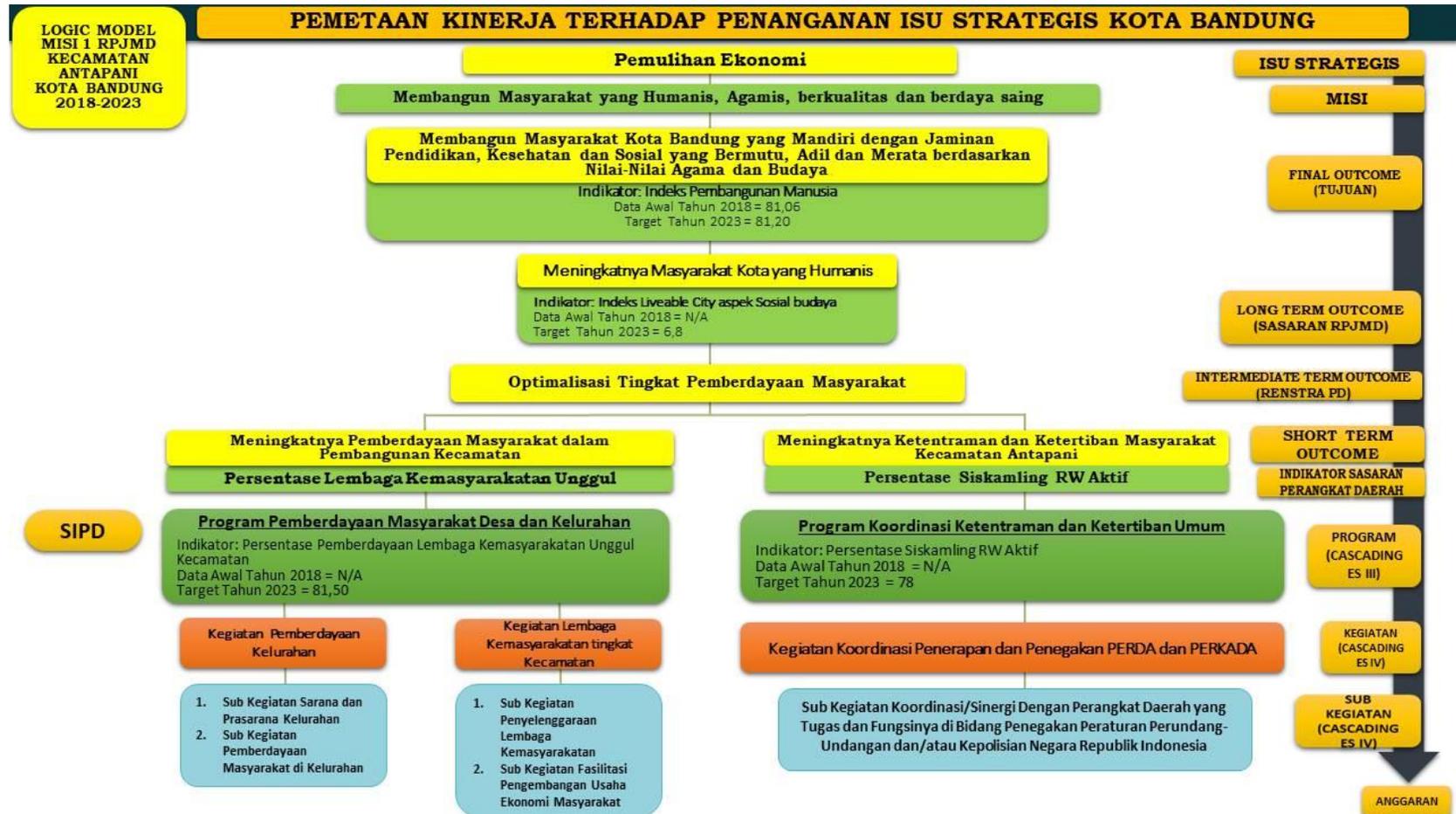
1.2. Analisis Logic Model

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan **logic model** yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/lembaga. *logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan.

Berikut ini adalah kerangka logis atau pemetaan kinerja yang menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Antapani dengan RPJMD 2018-2023.

Gambar 5.1
Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 – 2023
Kecamatan Antapani





1.3. Nilai-nilai Strategis Organisasi

Sebagai institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Antapani berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam visi Kota Bandung, yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera dan Agamis yang merupakan perwujudan dari harapan warga Kota Bandung. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan Kota Bandung dan kehidupan sosial warganya yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera dan Agamis.

Kecamatan Antapani secara khusus juga memiliki nilai-nilai yang merupakan kekhasan masyarakat di Kecamatan Antapani, yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan Antapani. Adapun nilai-nilai strategis organisasi Kecamatan Antapani tersebut adalah:

- a) **Profesional**, keseimbangan antara kesejahteraan di lingkungan aparatur Kecamatan Antapani serta upaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan Antapani membutuhkan aparatur yang profesional.
- b) **Produktif**, adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan Antapani untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Antapani yang produktif sejalan dengan meningkatnya produktivitas aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Antapani, untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c) **Kondusif**, merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Antapani memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat Antapani agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Antapani.
- d) **Kolaboratif**, sinergi dan harmoni di lingkungan aparatur Kecamatan, dan keseimbangan hubungan antar elemen masyarakat di Kecamatan Antapani, adalah jaminan lancarnya keadilan pembangunan.

1.3.1 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Antapani yang unggul melalui pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Antapani. Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

- a). Komitmen internal dan sinergi aparaturnya Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Antapani;
- b). Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Antapani yang terjamin;
- c). Kepemimpinan Kecamatan Antapani yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan;
- d). Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Antapani yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- e). Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal;
- f). Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai;
- g). Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara;
- h). Konsisten dan fokus pada ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, pusat ekonomi, dan pemukiman



1.4 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut :

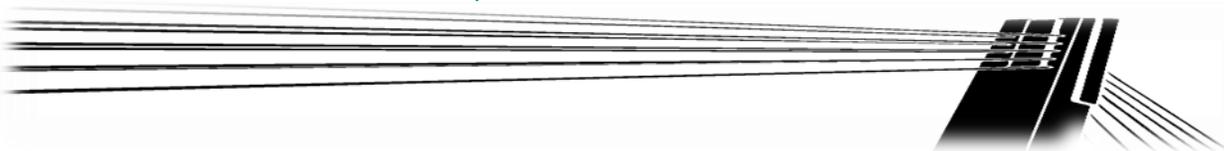
1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Antapani
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Antapani dapat dilihat di tabel dibawah ini :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparatur kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Misi 5 Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi			
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Setelah Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Antapani	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Antapani	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Antapani	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik



BAB VI

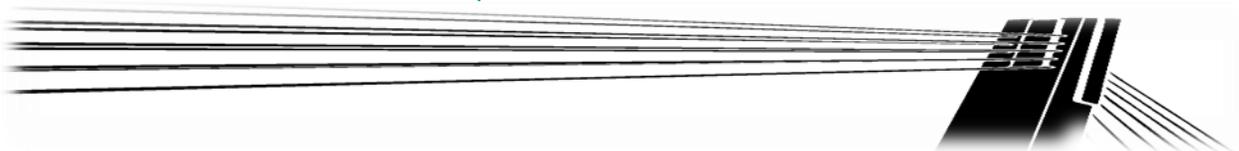
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,

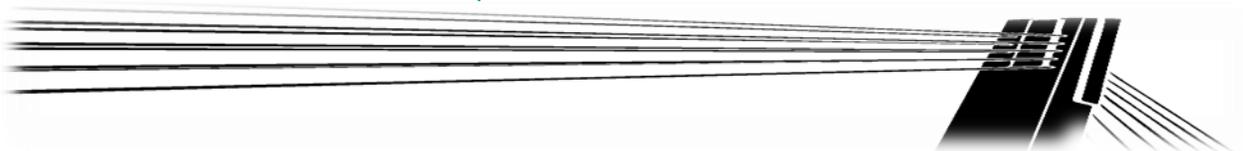


sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Antapani pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya



rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Antapani periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Antapani sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	4.05.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	1.789.736.539	100%	1.968.710.193	100%	2.165.581.212	100%	2.382.139.333	100%	2.620.353.267	100%	10.926.520.544		
		4.05.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	357.941.620	12 laporan	393.735.782	12 laporan	433.109.360	12 laporan	476.420.296	12 laporan	524.062.326	12 laporan	2.185.269.384		
		4.05.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa	45 Unit	45 Unit	10.732.640	45 Unit	11.805.904	45 Unit	12.986.494	45 Unit	14.285.144	45 Unit	15.713.658	45 Unit	65.523.840		



			Kendaraan Dinas/Operasional	perizinannya															
		4.05.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.720.000	12 Jasa Bulanan	4.092.000	12 Jasa Bulanan	4.501.200	12 Jasa Bulanan	4.951.320	12 Jasa Bulanan	5.446.452	12 Jasa Bulanan	22.710.972		
		4.05.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	8 Unit	8 Unit	53.377.000	8 Unit	58.714.700	8 Unit	64.586.170	8 Unit	71.044.787	8 Unit	78.149.266	8 Unit	325.871.923		
		4.05.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	12 laporan	167.153.509	12 laporan	183.868.860	12 laporan	202.255.746	12 laporan	222.481.320	12 laporan	244.729.453	12 laporan	1.020.488.888		
		4.05.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 laporan	12 laporan	110.743.233	12 laporan	121.817.556	12 laporan	133.999.312	12 laporan	147.399.243	12 laporan	162.139.167	12 laporan	676.098.512		
		4.05.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	4 laporan	4 laporan	39.268.640	4 laporan	43.195.504	4 laporan	47.515.054	4 laporan	52.266.560	4 laporan	57.493.216	4 laporan	239.738.974		



		4.05.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	3 laporan	3 laporan	280.553.999	3 laporan	308.609.399	339.470.339	3 laporan	373.417.373	3 laporan	410.759.110	3 laporan	1.712.810.219		
		4.05.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	4 laporan	4 laporan	70.290.198	4 laporan	77.319.218	85.051.140	4 laporan	93.556.254	4 laporan	102.911.879	4 laporan	429.128.688		
		4.05.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4 laporan	4 laporan	23.383.000	4 laporan	25.721.300	28.293.430	4 laporan	31.122.773	4 laporan	34.235.050	4 laporan	142.755.553		
		4.05.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan	12 laporan	283.822.700	12 laporan	312.204.970	343.425.467	12 laporan	377.768.014	12 laporan	415.544.815	12 laporan	1.732.765.966		
		4.05.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar	5 laporan	5 laporan	150.000.000	5 laporan	165.000.000	181.500.000	5 laporan	199.650.000	5 laporan	219.615.000	5 laporan	915.765.000		



daerah																		
		4.05.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	12 laporan	238.750.000	12 laporan		12 laporan	262.625.000	288.887.500	317.776.250	349.553.875	12 laporan	1.457.592.625		
		4.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100 %	100 %	665.386.284	100 %	7.766.839.413	100 %	843.523.354	100 %	927.875.689	100 %	1.020.663.258	100 %	11.224.287.998	
		4.05.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			0	1 unit	34.914.500	1 unit	38.405.950	1 unit	42.246.545	1 unit	46.471.200	1 unit	162.038.195	
		4.05.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	4 jenis	4 jenis	65.303.597	4 jenis	71.833.957	4 jenis	79.017.352	4 jenis	86.919.088	4 jenis	95.610.996	4 jenis	398.684.990	
		4.05.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Ber	Jumlah unit bangunan terpelihar	2 unit	2 Unit	112.008.300	2 Unit	123.209.130	3 Unit	135.530.043	4 Unit	149.083.047	4 Unit	163.991.352	5 Unit	683.821.872	



			kala Gedung Kantor	a														
		4.05.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpeliharaan	40 Unit	40 Unit	376.485.000	40 Unit	414.133.500	40 Unit	455.546.850	40 Unit	40 Unit	501.101.535	40 Unit	551.211.689	40 Unit	2.298.478.574
		4.05.02.42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	111.589.387	1 gedung	7.122.748.326	1 gedung	135.023.159	1 gedung	1 gedung	148.525.474	1 gedung	163.378.022	1 gedung	7.681.264.368
		4.05.03	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase Pemenuhan prasaran a kedisiplinan pegawai	100 %	100 %	33.385.000	100 %	141.856.000	100 %	156.041.600	100 %	100 %	171.645.760	100 %	188.810.336	100 %	691.738.696
		4.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 stell	45 stell	33.385.000	45 stell	36.723.500	45 stell	40.395.850	45 stell	45 stell	44.435.435	45 stell	48.878.979	45 stell	203.818.764
		4.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari	- Jumlah Pakaian Khusus	0	0	0	135 stell	105.132.500	135 stell	115.645.750	135 stell	135 stell	127.210.325	135 stell	139.931.358	135 stell	487.919.933



			tertentu	Hari-Hari Tertentu														
		4.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	100 %	66.000.000	100 %	72.600.000	100 %	79.860.000	100 %	87.846.000	100 %	96.630.600	100 %		
		4.05.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 paket	1 paket	66.000.000	1 paket	72.600.000	1 paket	79.860.000	1 paket	87.846.000	1 paket	96.630.600	1 paket	402.936.600	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	80	80		80,52		80,82		81,21		81,55		81,55		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	N/A	N/A		50%		50%		75%		100%		65%		



			<i>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	1.578.987.246	75%	1.793.627.271	76%	1.972.989.998	78%	2.170.288.997	80%	2.387.317.897	80%	9.954.794.409		
		1.05.15.05	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	30 RW	30 RW	994.875.674	40 RW	1.094.363.241	50 RW	1.203.799.566	55 RW	1.324.179.522	62 RW	1.456.597.474	62 rw	6.073.815.477		
		2.07.25.05	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	85 Orang	85 Oran g	58.882.600	95 Orang	64.770.860	95 Orang	71.247.946	105 Orang	78.372.741	115 Orang	86.210.015	115 Orang	359.484.161		
		1.06.33.01	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader RW siaga</i>	n/a	6 Kader/ Klip	472.448.200	6 Kader/ Klip	519.693.020	6 Kader/ Klip	571.662.322	6 Kader/ Klip	628.828.554	6 Kader/ Klip	691.711.410	6 Kader/ Klip	2.884.343.506		
		2.11.25.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>pembentukan koperasi di tempat ibadah</i>	n/a	n/a	52.780.772		58.058.849		63.864.734		70.251.208		77.276.328		322.231.891		
		4.01.19.53	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenba</i>	n/a	n/a	51.583.000		56.741.300		62.415.430		68.656.973		75.522.670		314.919.373		



		Kecamatan																
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Antapani			Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	80		80,52		80,82		81,21		81,55		81,55		
		2.06.20	Program Pengadmi nistrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public	80	80	1.557.244.000	80,52	1.712.968.400	80,82	1.884.265.240	81,21	2.072.691.764	81,55	2.279.960.940	81,55	9.507.130.344	
		2.06.20.01	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayah an	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	100%		157.776.000	100%	173.553.600	100%	190.908.960	100%	209.999.856	100%	230.999.842	100%	963.238.258	
		2.06.20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapat pembinaan	62 RW	62 RW	1.399.468.000	62 RW	1.539.414.800	62 RW	1.693.356.280	62 RW	1.862.691.908	62 RW	2.048.961.099	62 RW	8.543.892.087	
		1.03.42	Program Pemeliharaan	Prosentase minimal	78,50%	78,50%	1.274.027.696	78,50%	1.401.430.466	78,50%	1.541.573.512	78,50%	1.695.730.863	78,50%	1.865.303.950	78,50%	7.778.066.487	



			Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih															
		1.03.42.14	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	1500 m2	1500 m2	1.174.112.020	1500 m2	1.291.523.222	1500 m2	1.420.675.544	1500 m2	1.562.743.099	1500 m2	1.719.017.408	1500 m2	7.168.071.293		
		1.03.42.15	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	2000 M2	2000 M2	74.817.116	2000 M2	82.298.828	2000 M2	90.528.710	2000 M2	99.581.581	2000 M2	109.539.740	2000 M2	456.765.975		
		1.03.42.16	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	2000 m	2000 m	25.098.560	2000 m	27.608.416	2000 m	30.369.258	2000 m	33.406.183	2000 m	36.746.802	2000 m	153.229.219		
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	60%	60%		62%		65%		67%		69%		72%			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat				Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasya	78,50%	78,50%		79,00%		79,40%		79,80%		80,00%		80,20%			



at				rakatan Kewilaya han															
		2.07.26	Program Pemberda yaan Kewilayah an	Tingkat Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan	78,5 0%	78,5 0%	7.400.581. 075	79,0 0%	8.140.639. 183	79,4 0%	8.954.703.1 01	79,8 0%	9.850.173.4 11	80,0 0%	10.835.190.752	80,2 0%	11.918.7 09.827		
		2.07.26. 01	Kegiatan Fasilitasi Pemberday aan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanP emberday aan Lingkup RW	71 sub kegi ata n	71 sub kegi atan	6.201.248. 004	71 sub kegi atan	7.750.000. 000	71 sub kegi atan	9.300.000. 000	71 sub kegi atan	10.850.000. 000	71 sub kegi atan	12.400.000.000	71 sub kegi atan	46.501.2 48.004		
		2.07.26. 02	Kegiatan Fasilitasi Pemberday aan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanP emberday aan Lingkup PKK	8 sub kegi ata n	32 sub kegi atan	399.419.3 24	32 sub kegi atan	400.000. 000	32 sub kegi atan	400.000.00 0	32 sub kegi atan	400.000.0 00	32 sub kegi atan	400.000.000	32 sub kegi atan	400.000 .000		
		2.07.26. 03	Kegiatan Fasilitasi Pemberday aan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanP emberday aan Lingkup Karang Taruna	9 sub kegi ata n	24 sub kegi atan	399.919.0 42	24 sub kegi atan	400.000. 000	24 sub kegi atan	400.000.00 0	24 sub kegi atan	400.000.0 00	24 sub kegi atan	400.000.000	24 sub kegi atan	400.000 .000		
		2.07.26. 04	Kegiatan Fasilitasi Pemberday aan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanP emberday aan Lingkup LPM	6 sub kegi ata n	20 sub kegi atan	399.994.7 05	20 sub kegi atan	400.000. 000	20 sub kegi atan	400.000.00 0	20 sub kegi atan	400.000.0 00	20 sub kegi atan	400.000.000	20 sub kegi atan	400.000 .000		
		4.01.19	Program Perencana an Pembangu nan Daerah	prosentas e partisipasi masyaraka t	100 %	100 %	51.583.00 0												



		4.01.19.53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RRPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	80 Ora ng	850 rang	51.583.00 0											
		2.11.25	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi di tempat ibadah	86,1 5 %	86,1 5 %	52.780.77 2											
		2.11.25.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	jumlah koperasi di tempat ibadah	45 Usaha / Klp / Org	75 Usaha / Klp / Org	52.780.77 2											



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Antapani setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	88,49	n/a	75,04	n/a	80,50	7.468.246.000	81	7.593.626.000	81,50	8.352.988.600	81,50	8.352.988.600	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan</i>	n/a	88,49	n/a	75,04	n/a	80,50	7.400.000.000	81	7.500.000.000	81,50	8.250.000.000	81,50	8.250.000.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	62	6.064.966.525	63	6.155.920.000	63	6.771.512.000	63	6.771.512.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1.335.033.475	4	1.344.080.000	4	1.478.488.000	4	1.478.488.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76	68.246.000	77	93.626.000	78	102.988.600	78	102.988.600	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	72	50.020.000	73	74.980.000	74	82.478.000	74	82.478.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	18.226.000	4	18.646.000	4	20.510.600	4	20.510.600	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76	2.147.104.748	78	1.602.361.200	80	1.762.597.320	80	1.762.597.320	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76	2.147.104.748	78	1.602.361.200	80	1.762.597.320	80	1.762.597.320	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah pembinaan siskamling RW</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	2.147.104.748	12	1.602.361.200	12	1.762.597.320	12	1.762.597.320	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	n/a	50	n/a	75	n/a	75	3.842.181.500	75	3.795.237.385	100	4.174.761.124	100	4.174.761.124	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	n/a	100	n/a	100	n/a	100	1.622.416.500	100	1.646.416.500	100	1.811.058.150	100	1.811.058.150	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	12	n/a	12	n/a	12	1.622.416.500	12	1.646.416.500	12	1.811.058.150	12	1.811.058.150	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	65.200.000	100	65.200.000	100	71.720.000	100	71.720.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	65.200.000	100	65.200.000	100	71.720.000	100	71.720.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.518.927.000	100	1.528.003.755	100	1.680.804.131	100	1.680.804.131	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.0 1.0 2.2. 03. 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah RTH terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2		2		2		2	1.680.804.131	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 2.2. 03. .01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4000 m2	1.518.927.000	4000 m2	1.528.003.755	4000 m2	1.680.804.131	4000 m2	-	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.0 1.0 2.2. 04. 03	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	635.638.00 0	12	555.617.13 0	12	611.178.84 3	12	611.178.84 3	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	
		7.0 1.0 2.2. 04. 03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	635.638.00 0	12	555.617.13 0	12	611.178.84 3	12	611.178.84 3	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	
		7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		100		100		100	100	12.817.226. 895	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1		2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	10.814.323 .460	100	11.652.024 .450	100	12.817.226 .895	100	100	-	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



				akumulasi)															
		7.0 1.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pembinaan Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	-	100	49.180.560	100	54.098.616	100	54.098.616	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	-	1	49.180.560	1	54.098.616	1	54.098.616	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	9.192.881.737	100	9.471.346.421	100	10.418.481.063	100	10.418.481.063	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	9.192.881.737	14	9.471.346.421	14	10.418.481.063	14	10.418.481.063	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.0 1.0 1.2. 06	Adminis- trasi Umum Perangk- at Daerah	Cakupan Pelayanan Administras- i Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	505.652.67 3	100	581.659.46 9	100	639.825.41 6	10 0	639.825.41 6	Kecamata- n Antapani	Kecamata- n Antapani
		7.0 1.0 1.2. 06. 01	Penyedia- an Kompon- e Instalasi Listrik / Penerang- an Banguna- n Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	17.393.800	4	16.907.200	4	18.597.920	4	18.597.920	Kecamata- n Antapani	Kecamata- n Antapani
		7.01. 01.2. 06.0 2	Penyedia- an Peralatan dan Perlengkap- an Kantor (termasu- k ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	226.194.12 3	4	286.493.02 9	4	315.142.33 2	4	315.142.33 2	Kecamata- n Antapani	Kecamata- n Antapani
		7.0 1.0 1.2. 06. 03	Penyedia- an Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	28.645.100	4	30.400.700	4	33.440.770	4	33.440.770	Kecamata- n Antapani	Kecamata- n Antapani
		7.0 1.0 1.2. 06. 04	Penyedia- an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	145.676.20 0	4	174.260.60 0	4	191.686.66 0	4	191.686.66 0	Kecamata- n Antapani	Kecamata- n Antapani



		7.0 1.0 1.2. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetak dan pengandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	63.633.450	12	49.967.940	12	54.964.734	12	54.964.734	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	8.766.000	12	8.286.000	12	9.114.600	12	9.114.600	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	15.344.000	100	15.344.000	100	16.878.400	100	16.878.400	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	656.326.220	100	684.480.800	100	752.928.880	100	752.928.880	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.0 1.0 1.2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	288.976.220	12	317.130.800	12	348.843.880	12	348.843.880	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	363.600.000	12	363.600.000	12	399.960.000	12	399.960.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	3.750.000	12	3.750.000	12	4.125.000	12	4.125.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	425.450.830	100	761.870.200	100	838.057.220	100	838.057.220	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



		7.0 1.0 1.2. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	386.164.700	100	428.947.200	100	471.841.920	100	471.841.920	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	6.290.000	4	20.820.000	4	22.902.000	4	22.902.000	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	32.996.130	5	312.103.000	5	343.313.300	5	343.313.300	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani
		7.0 1.0 1.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	34.012.000	1	103.487.000	1	113.835.700	1	113.835.700	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani



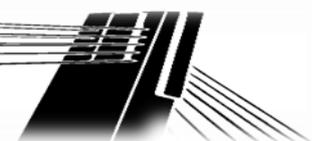
		7.0 1.0 1.2. 05. 02	Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	n/a	n/a	n/a	n /a	n/a	1	34.012.000	1	103.487.00 0	1	113.835.70 0	1	113.835.70 0	Kecamata n Antapani	Kecamata n Antapani
--	--	---------------------------------	---	--	-----	-----	-----	---------	-----	---	------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---------------------------	---------------------------



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Antapani Kota Bandung berdasarkan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan indikatif, sebagai berikut :

Tabel 6.3
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019- 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Posyandu Purnama
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu



Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah RTH terpelihara
	Panjang jalan dan saluran air terpelihara
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial
Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)
	2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara

Program Prioritas Tahun 2019- 2023

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2019-2023 adalah Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Antapani Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Antapani untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Antapani Kota Bandung yaitu :

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
2. Persentase siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Antapani Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Renstra Perubahan Kecamatan Antapani 2018-2023





Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum perubahan Kecamatan Antapani Kota

Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Nilai	80	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria	Kecamatan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA	
	dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan				dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	kelurahan unggul	<p>kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Peningat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<ul style="list-style-type: none"> - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpisah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						(Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank sampah tiap Kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<ul style="list-style-type: none"> - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA	
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	20.10	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan	<p>RW Unggul</p> <p>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya</p> <p>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<ul style="list-style-type: none"> c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART 6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahtu rahmi 7. RW berdaya <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>dan Wakaf)</p> <p>c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</p> <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p> <p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana</p>



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kegiatan lebih dari 8 kali</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kader lebih dari 5 orang</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare <p style="margin-left: 20px;">d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskamling Aktif</p> <p>% PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan</p>



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>% Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis- jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>pengolahan sampah</p> <p>6. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana</p> <p>8. Event Olah raga</p> <p>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)</p> <p>% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <p>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai</p>



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	KETERANGAN /KRITERIA
						<p>ruang lingkup Karang Taruna</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Antapani Kota
Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Lingkup kegiatan: 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan peanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Antapani	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Antapani	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpisah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - Pemilahan Sampah - Pemanfaatan Sampah <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)



BAB VIII

PENUTUP



Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA Perubahan ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Antapani periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Antapani harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.



3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Antapani harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Antapani Tahun 2018-2023
4. RENSTRA Kecamatan Antapani akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Antapani tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Antapani Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Antapani.

Bandung, 7 Desember 2021



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
CAMAT ANTAPANI
Rahmawati Mulia
Dra. RAHMAWATI MULIA, M.Si
Pembina TK I
NIP. 196607251992012002

